

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rokhmad, 2013, "Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh". Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Semarang.
- Alting, Husman. 2011. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Baringbing, Mevitama Shindi. 2017. *Konflik Agraria atas Penguasaan Hutan Kemenyan Adat (Tombak Haminjon Antara Masyarakat Pandumaan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan)*. Thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
- Bungin, Burhan. 2016. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Cahyono, Eko et al (2016) . *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Daririn, Ririn. 2015. *Sengketa Agraria: Kebijakan Perlawanan Dari masa ke Masa*. Staff.uny.ac.id
- D'Andrea, Claudia. 2013. *Kopi, Adat, dan Moral : Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- Eko, Cahyono 2016. *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Policy Paper.
- Fadli, Fendi Setyawan (2014). *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta.
- Haris, A., Rahman, A. B., & Ahmad, W. I. (2019). *Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), 1(1), 15-24.
- Ihzudin, Ahmad. 2015. *Gerakan Sosial Serikat Petani Daerah Istimewa Togyakarta Periode 2006-2015 (Strategi, Pola dan Tantangan)*. Digilid.uinsuka.ac.id.
- Iswantoro. 2012. *Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional*.
- J.Kurniawan, Luthfi. 2012. *Negara, Civil Society & Social actkratisasi*. Malang. Intrans Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Konoras, A (2017) . *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa: Secara Mediasi di Pengadilan*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarakat Batak VS PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara*. Yogyakarta : UGM Press.
- Marbun, Kevin. (2020). *Gerakan Koko (Kotak Kosong) : Studi kasus pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020*. Jurnal.unpad.ac.id

- Mongabay.co.id. “Perda Pengakuan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Ketok Palu”, 20 February 2019.
- Nurjaya, I Nyoman, 2015. *Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Rachman, N. F. (2017). *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Insistpress: Yogyakarta.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047.
- Ratnah,Rahma .2017. *Konflik Masyarakat dengan pemerintah:Studi Kasus Sengketa Tanah adat. Sosioreligius Volume III No. 1.*
- Rini, W. silvi D. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *JURNAL CITA HUKUM*, 4(1).
- Scott, James C, 1983. *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott,James C, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Setiawan, Ahmad, 2019. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Laksbang Justiti.
- Setiadi dan Kolip, *Penantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Surabaya: Kencana, 2011) hal. 361.
- Satori.Dj.,Aan Komariah.2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Silalahi, Masron Delima. 2015. “Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi Dan Hak-Hak Adat Studi Di Desa Pandumaan Dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan-Sumatera Utara”. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Simanjuntak, Suryati. 2016. “Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari”. Dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, 19-52. Editor Eko Cahyono, dkk. Jakarta : Komnas HAM.
- Sinurat. L.P 2020. “ Hak atas tanah adat: Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama Era Reformasi”. *Jurnal “Al-Qalam” Volume 25 Nomor 3 November 2019.*
- Situmorang Wahib Abdul. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sufyan,Ahmad, 2015. *Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang*. Skripsi. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Manan (2020). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jember. Media Cetak Aksara.
- Suharko. 2018. *Gerakan Baru di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10 No. 1.

- Suryati, S. 2014. Merampas Haminjon, Merampas Hidup; Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari. Working Paper Sajogyo Institute.
- Susan, Novri. 2014. Pengantar Sosial Konflik. Jakarta: Kencana.
- Vergouwen, J.C, 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta : Pelangi Aksara.
- Widowati, Dyah Ayu. dkk. 2015. "*Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*". Dalam Asas-Asas Keagrariaan Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia, 417-524.
- W. Creswell, John. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- W. Creswell, John. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria.
- Republik Indonesia. Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.